

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2010-2018 dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah yaitu derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah, dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dikategorikan memperoleh kemampuan daerah dengan predikat sangat rendah karena berada pada skala derajat desentralisasi fiskal yang diperoleh diantara 00,00%-10,00%. Sedangkan hanya Kota Kupang yang memiliki rata-rata skala derajat desentralisasi fiskal sebesar 10,00%-20,00% yakni 11,92% dengan kategori kurang. Sedangkan Kabupaten Nagekeo memiliki rata-rata skala derajat desentralisasi fiskal terendah yakni sebesar 4,28%.
2. Berdasarkan hasil analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2010-2018 menunjukkan Kota Kupang memiliki rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah terendah dibandingkan 21 Kabupaten lainnya yaitu 75,27% dan Kabupaten Rote Ndao memiliki rata-rata rasio

ketergantungan keuangan daerah tertinggi karena berada pada skala 86,82%.

3. Berdasarkan Presentase Kemandirian Keuangan Daerah, Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dikategorikan memperoleh kemampuan daerah dengan predikat rendah sekali karena rata-rata presentase kemandirian keuangan daerah yang diperoleh antara 0,00%-25,00%. Kota Kupang memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dibandingkan dengan 21 Kabupaten lainnya dengan skala 16,03% dan Kabupaten Nagekeo terendah dengan skala 15,17%.

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, apabila rasio derajat desentralisasi fiskalnya tinggi maka rasio kemandirian keuangan daerah juga makin tinggi dan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap transfer Pemerintah Pusat makin rendah. Dan sebaliknya, apabila derajat desentralisasi fiskalnya rendah maka tingkat kemandirian keuangan daerahnya juga rendah sedangkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin tinggi.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan desentralisasi fiskal yaitu tingginya penerimaan PAD dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Perimbangan yang rendah.

## 6.2 Saran

1. Berdasarkan skala Derajat Desentralisasi Fiskal, rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten di Provinsi NTT dikategorikan memperoleh kemampuan daerah dengan predikat sangat rendah karena berada pada skala 00,00%-10,00%. Sedangkan hanya Kota Kupang yang memiliki kemampuan daerah dengan predikat rendah dengan skala derajat desentralisasi sebesar 10,01%-20,00%. Hal ini menunjukkan bahwa, penyelenggaraan desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat dikatakan belum maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan menggali potensi-potensi baru atau memperluas objek-objek yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya.
2. Berdasarkan Presentase Ketergantungan Keuangan Daerah, rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dikategorikan memperoleh ketergantungan daerah dengan predikat sangat tinggi karena presentase ketergantungan keuangan yang diperoleh  $>50\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT masih sangat ketergantungan dengan dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT harus meningkatkan penerimaan PAD sehingga menjadi sumber utama dalam melakukan pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat.

3. Berdasarkan Presentase Kemandirian Keuangan Daerah, Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dikategorikan memperoleh kemampuan daerah dengan predikat rendah sekali karena presentase kemandirian keuangan yang diperoleh antara 0,00%-25,00%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat dikatakan belum mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi yang telah ada. Peningkatan PAD bisa dilakukan dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan desentralisasi fiskal yaitu tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Perimbangan semakin rendah. Data menunjukkan bahwa masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Salah satu sumber penerimaan PAD terbesar yaitu Pajak. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus meningkatkan penerimaan PAD dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak, dan Pemerintah Daerah harus kreativitas dalam menggali potensi PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad fanani. 2011, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 1988-2008*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
- Anna Prihatiningsih. 2010, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Badan Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta*.
- Bisma dan Susanto. 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007*, Ganec Swara Volume 4 No. 3 Tahun 2010 edisi Desember
- Erwina Anwar, Anderson Kumenaung dan George Kawung. 2013, *Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Efisiensi, Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Hadi, Sofyan dan Saragih, Tony M. 2013. *Ontologi Desentralisasi Fiskal dalam Negara Kesatuan*. Perspektif Volume XVIII No. 3 Tahun 2013 edisi September.
- Halim, Abdul. 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_.2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- <http://www.ntt.bps.go.id>
- Lamariang, Ansys Sergius Daton. 2019, “*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Malaka*”, Skripsi. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira
- Komang Ayu Kumaradewdi dan Halim, Abdul. 2019. *Menakar Keberhasilan Desentralisasi Dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*. JAKD Volume 8. Nomor 2 Februari 2019

- Mardiasmo. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Mahmudi. 2010, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Maria Margareta Kusumawardani. 2015, “*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*”, Yogyakarta: Universitas Sanata Darma
- Republik Indonesia 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sasana, Hadi. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No. 1, Juni 2009, Hal. 103-124
- Siswanto Sumarno. 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Gravika
- Wulandari, Anita. 2011. *Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, JKAP Volume 5, Nomor 2 November 2011